



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

**KEGIATAN :
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BUMD
BIDANG JASA PRODUKSI**

**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2020**

I. KETENTUAN UMUM

- Nama Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Jasa Produksi.
- Sumber Pendanaan : APBD Provinsi Jawa Tengah pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Besar Anggaran : Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- L o k a s i : BUMD Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta luar provinsi
- Nama Pengguna Anggaran : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

II. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan menguatnya pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kontribusi PAD dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan Permendagri No. 13/2006, PAD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat sedangkan lain-lain pendapatan yang sah meliputi dana-dana bantuan.

Kebijakan anggaran Pemerintah sekarang dan ke depan, subsidi akan dikurangi secara perlahan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Pemerintah Pusat. Dengan demikian peran PAD harus makin meningkat. Dengan subsidi Pusat yang makin berkurang, dan sesuai dengan semangat otonomi daerah, PAD akan menjadi sumber utama pendapatan Daerah. Porsi PAD yang lebih besar akan membuat struktur anggaran lebih sehat dan Daerah menjadi lebih mandiri serta lebih leluasa melaksanakan pembangunan.

Ke depan, komponen PAD yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah akan semakin sulit ditingkatkan karena akan membebani masyarakat. Maka deviden dari BUMD seharusnya dapat menjadi andalan, menyumbangkan porsi yang lebih besar dalam PAD. Untuk itulah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham tunggal di 2 BUMD bidang jasa dan produksi (PD Citra Mandiri Jawa Tengah dan PDAB Tirta Utama), pemegang saham mayoritas di 5 BUMD (PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah, PT. Sarana Patra Hulu Cepu, PT. PRPP), dan pemegang saham di BUMN pihak ke 3

(PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma) perlu melakukan pembinaan terhadap BUMD yang dimilikinya, agar kinerja BUMD semakin meningkat dan menjadi penyumbang PAD yang dapat diandalkan.

Hal ini berkaitan erat dengan tujuan pendirian BUMD berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan bumd bidang jasa produksi dalam rangka mendorong peningkatan kinerja BUMD melalui efisiensi, dan optimalisasi pengelolaan SDM dan aset-asetnya. Selain hal tersebut, kegiatan ini juga merupakan fasilitasi upaya pemecahan masalah masing-masing BUMD/BUMN dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan menuju BUMD/BUMN yang sehat serta peningkatan setoran PAD dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

C. SASARAN

Sasaran kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan bumd bidang jasa produksi tahun 2020 adalah 8 BUMD/BUMN di Jawa Tengah yang merupakan lembaga bisnis milik Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan PAD serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

D. BENTUK KEGIATAN

Kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan bumd bidang jasa produksi terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

1. Seminar Efektifitas pelaksanaan kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi;
2. Pembinaan BUMD Bidang Jasa dan Produksi;
3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) BUMD Bidang Jasa dan Produksi.
4. Koordinasi Konsultasi Efektifitas pelaksanaan kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi ke pusat dan luar Provinsi

E. TUJUAN DAN OUTPUT :

1. Seminar Efektifitas pelaksanaan kebijakan BUMD Bid. Jasa Produksi;
 - a. Tujuan :

Mendapatkan wawasan/pengetahuan pelaksanaan kebijakan BUMD Bidang Jasa Produksi.

b. Output :

Adanya gambaran yang lebih jelas mengenai solusi permasalahan dalam efektifitas pelaksanaan BUMD Bidang Jasa Produksi.

2. Pembinaan BUMD Bid. Jasa dan Produksi;

a. Tujuan :

1) Melakukan evaluasi keuangan dan non keuangan terhadap BUMD atau unit-unit usahanya.

2) Monitoring permasalahan di lapangan.

b. Output :

1) Terlaksananya evaluasi keuangan dan non keuangan terhadap BUMD atau unit-unit usahanya.

2) Termonitornya permasalahan di lapangan.

3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) BUMD Bid. Jasa dan Produksi.

a. Tujuan :

1) Melakukan evaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) terhadap BUMD atau unit-unit usahanya.

2) Monitoring permasalahan pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) di lapangan.

b. Output :

1) Terlaksananya evaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) terhadap BUMD atau unit-unit usahanya.

2) Monitoring permasalahan pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) di lapangan.

4. Koordinasi Konsultasi Efektifitas pelaksanaan kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi ke pusat dan luar Provinsi.

a. Tujuan :

1) Meningkatkan pengetahuan tentang kinerja dan permasalahan BUMD Provinsi lain.

2) Meningkatkan pengetahuan tentang penyusunan kebijakan.

3) Mengetahui kendala dan solusi penyusunan kebijakan.

b. Output :

1) Meningkatnya pengetahuan tentang BUMD Provinsi lain.

2) Meningkatkan pengetahuan tentang penyusunan kebijakan.

3) Mengetahui kendala dan solusi penyusunan kebijakan.

F. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan Koordinasi BUMD dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan: Januari – Desember 2020 dengan lokasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

G. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan adalah APBD Provinsi Jawa Tengah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Semarang, Mei 2020

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP.19660611 198602 1 001